



## Radar Bali

### PARIPURNA



NYOMAN WIDIADNYANA/RADAR BALI

PARIPURNA: DPRD Gianyar menyampaikan rekomendasi terkait LKPJ.

### Dewan Beri Catatan LKPJ Bupati

GIANYAR - Paska penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar terkait anggaran 2014. Kemarin (27/4) giliran DPRD Gianyar yang menyampaikan rekomendasi terkait LKPJ tersebut. Beberapa catatan pun disampaikan wakil rakyat dalam rangkaian Sidang Paripurna Istimewa yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar.

Beberapa catatan sekaligus arahan yang disampaikan DPRD Gianyar dan dibacakan salah seorang anggotanya, Ida Bagus Nyoman Rai meliputi beberapa bidang. Seperti terkait dengan pendapatan dan pengeluaran daerah, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Untuk sektor pendapatan dan pengeluaran daerah, dewan berharap eksekutif bisa lebih optimal sekaligus menyesuaikan dengan potensi yang ada. Termasuk juga pelaksanaan pendapatan daerah yang sah lainnya supaya bisa berkelanjutan hingga perlunya pengembangan melalui pemungutan secara on line. "Sedangkan untuk pengeluaran daerah, tentunya supaya lebih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Untuk bidang kesehatan, dewan pun secara khusus memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk menambah tenaga dokter umum, spesialis, hingga dokter bedah. Termasuk didalamnya juga peningkatan para medis baik yang ada di puskesmas. Karena menurut dewan, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan mutu pelayanan. Usai pembacaan rekomendasi sekaligus catatan yang disampaikan anggotanya itu, Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta pun langsung menyerahkannya ke Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra yang hadir mewakili Bupati AA Gde Agung Bharata. "Dengan beberapa rekomendasi dan catatan tersebut, kami berharap eksekutif bisa merumuskan sekaligus menyempurnakan kembali penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang," kata Tagel Winarta. (wid/gup)

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 25



# Diduga Banyak Laporan Abu-abu

## Komite SDN 2 Kesiman Laporkan ke UPT

DENPASAR - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Denpasar Timur, akhirnya mengecek laporan pertanggungjawaban dana BOS di SDN 2 Kesiman, Senin kemarin (27/4). Menyusul laporan keluhan komite sekolah kepada pihak UPT, bahwa ada beberapa laporan yang diduga 'abu-abu' alias tidak jelas. Kepala UPT Disdikpora Denpasar Timur I Wayan Santa saat ditemui di ruang kerjanya, tidak membantah jika pihaknya

telah melakukan pengecekan ke SDN 2 Kesiman. Bahkan, pihak sudah menerjunkan pengawas untuk meminta keterangan kepada pihak sekolah. "Dana BOS sudah seharusnya dipertanggungjawabkan secara bagus sesuai realisasi. Tapi kami belum tahu sejauh mana dana BOS di SDN 2 Kesiman ini dikatakan abu-abu. Maka itu pengawas kami akan turun dulu untuk mengecek. Kami tidak boleh juga menuduh sembarangan," ujarnya.

Menurut Santa, pihaknya akan terus mendalami laporan tersebut dan secara detail akan memeriksa laporan dana BOS SDN 2 Kesiman, terlebih format laporan

pertanggungjawaban dana BOS saat ini mengalami perubahan. "Kami belum bisa memastikan sampai kapan akan melakukan pengecekan. Mungkin agaknya karena harus detail melakukan pengecekan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komite SDN 2 Kesiman Nyoman Mandra membenarkan jika pihaknya beserta orang tua murid telah melapor ke UPT Denpasar Dimur. atas dugaan laporan yang masih abu-abu tersebut. "Saya juga tidak mau asal tuduh, makanya saya ke sini bersama perwakilan orang tua murid yang lain untuk bertanya dan meminta petunjuk," jelasnya. (hen/han)

Edisi : Selasa, 20 April 2015

Hal : 24



## Permendagri Dinilai Membbingungkan

**SEMENTARA** itu, masih terkait persiapan pilkada serentak di enam kabupaten/kota di Bali mendatang, Ketua KPUD Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan bahwa, pihak KPUD Bali telah melakukan penandatanganan pakta integritas. Penandatanganan pakta integritas dalam pelaksanaan pemilu itu, menurut Raka Sandi, yakni sebagai wujud dan upaya KPUD untuk menciptakan pemilu yang berkualitas sekaligus berintegritas. "Kami berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak di enam kabupaten/kota agar berintegritas," ujar Raka Sandi di sela Kunjungan Kerja KPK RI di KPUD Bali, kemarin.

Selain itu, Raka Sandi juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi penyelenggara pilkada. Salah satunya, kata dia, ada sejumlah regulasi atau aturan yang belum keluar, padahal tahapan pilkada sudah berjalan. Selain itu, peraturan semacam Permendagri 44 masih membingungkan bagi penyelenggara.

Dia juga menandakan bahwa yang harus berintegritas dalam pelaksanaan pilkada bukan hanya penyelenggara pilkada saja, namun menurutnya para pemangku kepentingan lainnya juga harus

melakukan hal yang sama. Sehingga dengan begitu, pihaknya berharap pilkada bisa berjalan dengan lancar dan penyelenggaraannya selamat, karena pelaksanaan pilkada dengan benar.

Sedangkan masih dalam kesempatan itu, anggota KPU Bali Wayan Jondra, juga menegaskan, bahwa Permendagri 44 tidak mendukung KPU untuk bekerja transparan. Ketentuan-ketentuan di dalam Permendagri tersebut, menurut dia, tidak *rigid* (kaku). Karena itu, dia meminta kepada KPK untuk memberik *guide line* agar para penyelenggara pilkada bisa bekerja dengan selamat.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI Guntur Kusmeiyono, didampingi Spesialis Kampanye dan Sosialisasi KPK RI Alfi R Wahyu menyatakan, bahwa pihaknya akan tetap mengayomi para penyelenggara pilkada agar tetap berintegritas. Kata dia, sebenarnya yang disasar KPK bukan hanya penyelenggaranya, tetapi juga para calon pilkada dan para calon pemilih. Menurutnya, dengan ketiganya berintegritas diharapkan pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang bersih, tidak korupsi. (**pra/pit**)



## Rektor dan Mantannya Diperiksa

### Terkait Kasus Pengadaan Lahan Undiksha

**DENPASAR** - Setelah naik menjadi tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Undiksha, pihak Tim Jaksa mulai melakukan pemeriksaan saksi. Senin kemarin (27/4) ada tiga saksi yang diperiksa Kejati Bali. Tiga orang ini adalah Rektor Undiksha Nyoman Jampel, Mantan Rektor Undiksha Prof Nyoman Sudiana dan Prof Seken.

"Tiga orang yang diperiksa, mantan Rektor Prof Sudiana, kemudian Prof Seken dan Rektor saat ini Nyoman Jampel yang diperiksa," ungkap sumber koran ini di Kejati Bali. Dia

mengatakan bahwa mereka diperiksa sebagai saksi dalam pendalaman kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. "Sebelumnya saat penyelidikan sudah diperiksa, *kayaknya* sudah tiga kali. Sekarang pendalamannya saja," ungkapnya.

Dia diperiksa dari pagi pukul 09.00 sampai pukul 15.00 di Kejati Bali. Mereka diperiksa oleh Tim Jaksa penyidik, yaitu Gede Arthana, Wayan Suardi dan Akmal Kodrat. Dikonfirmasikan ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan memang tiga orang ini diperiksa. "Ya memang tiga orang yang diperiksa. Rektor, Mantan Rektor dan ada namanya Prof Seken," ungkap Ashari.

Dia juga mengatakan, selanjutnya akan ada pemeriksaan - pemeriksaan selanjutnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan mengumumkan nama tersangka setelah diminta oleh Aspidsus Kejati Bali.

Ini terkait pembelian lahan tanah seluas 15 hektare di daerah Jinengdalem, Singaraja, untuk pembangunan gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2009 lalu. Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6 juta per are, namun oleh panitia, harga tersebut di markup menjadi Rp 20 juta per are. Sehingga ada indikasi negara dirugikan puluhan miliar. (art/yes)

Edisi : selasa, 28 April 2015

Hal : 31



## Segera Ungkap Tersangka Baru

### Dampingi Winasa dalam Kasus Perdin

**NEGARA** - Janji penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara untuk mengungkap tersangka baru dalam kasus perjalanan dinas (Perdin) di Pemkab Jembrana sebentar lagi bakal terwujud. Guna mencari tersangka lain dalam kasus yang sudah menempatkan I Gede Winasa sebagai tersangka, penyidik segera melakukan ekspose kasus tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saat ini saya sedang melakukan koordinasi dengan petugas BPK Perwakilan Bali agar segera mengekspos perkara ini. Memang saat ini baru satu tersangka dalam kasus korupsi perjalanan dinas di Pemkab Jembrana. Tapi kami segera mengungkap pelaku lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kajari Negara, Teguh Subroto melalui Kasi Pidsus, Putu Sauca Arimbawa Tusan.

Ia berharap dalam ekspose perkara nanti, segera diketahui dengan jelas berapa sejatinya kerugian negara yang muncul akibat perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena

menurut perhitungan awal kerugian mencapai sekitar Rp. 600 juta lebih. Janji Kajari Teguh Subroto untuk mengungkap tersangka baru dikemukakan saat memeriksa Winasa beberapa waktu lalu.

Teguh Subroto memastikan, dari pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya pihaknya bisa saja memunculkan tersangka baru dalam kasus perjalanan dinas di Pemkab Jembrana. "Soal berapa banyak orang yang akan dijerat mendampingi Winasa sebagai tersangka, tergantung hasil ekspos kasus bersama BPK nanti. Yang penting Winasa tidak sendiri menjadi tersangka dalam kasus perjalanan dinas yang merugikan keuangan negara Rp. 600 juta lebih," katanya.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, tim penyidik Kejari Negara menunjukkan 63 tiket yang digunakan Winasa dalam perjalanan dinas selama dua tahun adalah palsu. Hal ini sempat membuat Winasa berang. Ia lantas menilai ada konspirasi masif yang dilakukan pihak tertentu untuk memojokkannya. Itu sebabnya Winasa segera melaporkan kasus tiket palsu tersebut ke Polisi. **(don/yes)**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 31



## Radar Bali

### Temuan Rp 7,7 M di Setwan Buleleng

SINGARAJA - Dana purna bakti dan *tirta yatra* di Sekretariat DPRD Buleleng, yang sempat digunakan anggota dewan pada periode 1999-2004, hingga kini masih menyisakan masalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali menyebut masih ada temuan di lembaga wakil rakyat itu. Nilainya mencapai Rp 7,7 miliar.

Selain itu, masih ada dana senilai Rp 300 juta di Sekretariat Daerah Buleleng, yang juga tercantum dalam temuan BPK RI. Dana Rp 300 juta itu digunakan untuk pembebasan lahan di Desa Pemuteran pada tahun 2003 lalu.

► Baca *Temuan...* Hal 31

## Khusus Dana Tirta Yatra, Terpidana Sudah Bebas

### ■ TEMUAN...

Sambungan dari hal 21

Khusus untuk dana *tirta yatra*, sebenarnya para terdakwa telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Singaraja. Para terpidana pun telah usai menjalankan hukumannya. Namun, hukuman itu tak menghilangkan kerugian negara. Dan, kerugian negara tetap harus digantikan.

Pemerintah pun dibuat bingung bagaimana cara mengembalikan keuangan negara itu. "Katanya masih ada sisa temuan dana *tirta yatra* dan purna bakti. Itu harus dikembalikan juga, meskipun terpidananya sudah menjalani hukuman. Ini yang membuat kami bingung," kata Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang ditemui di DPRD Buleleng usai Sidang Paripur-

na Istimewa, kemarin (27/4).

Sayangnya, Agus tak menjelaskan rencana konkret pemerintah menyelesaikan temuan BPK itu. Agus mengaku telah menyerahkannya kepada Kepala Inspektorat Buleleng Putu Yasa, agar segera diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Buleleng yang ditemui terpisah mengaku telah berusaha melakukan penagihan kepada para terpidana. Hanya

saja para terpidana berpendapat mereka telah menjalani masa hukuman kurungan badan. Akibatnya, dana itu tak bisa kembali seratus persen.

Yasa menyatakan telah bersurat kepada BPK RI Perwakilan Bali untuk memohon petunjuk lebih lanjut. "Apa diizinkan pemutihan, atau kami harus bagaimana. Kami masih menunggu petunjuk dari BPK Pusat," kata Yasa. (eps/yes)

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 31